

**MODEL PENENTUAN TARIF ANGKUTAN KOTA BERDASARKAN KETERJANGKAUAN
DAYA BELI MASYARAKAT PENGGUNA DI KOTA BANDUNG
(STUDI KASUS: TRAYEK SADANG SERANG-CARINGIN DAN TRAYEK MARGAHAYU
RAYA-LEDENG)**

¹ Aviasti, ² Asep Nana Rukmana, dan ³ Djamaludin

^{1,2,3} Program Studi Teknik Industri, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹Aviasti82@gmail.com, ²an_rukmana@yahoo.co.id, ³mas.jamal@gmail.com

Abstrak. Kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, berdampak pada kegiatan angkutan umum khususnya angkutan kota yang merupakan sarana transportasi bagi masyarakat kecil. Biaya operasional angkutan umum akan meningkat tentunya pihak pengusaha angkutan umum akan berusaha untuk mengatasinya dengan cara menaikkan tarif. Sedangkan bagi pihak masyarakat pengguna akan merasa keberatan jika tarif tersebut dinaikkan dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Untuk mengatasi permasalahan ini maka perlu dilakukan suatu kajian yang komprehensif terhadap penentuan tarif angkutan umum yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode Affordability/Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP). Luaran yang diperoleh pada tahun kedua adalah Kelayakan Pengguna; Nilai ATP dan Nilai WTP dari masyarakat Pengguna Angkot. Tarif Ideal yang sesuai dengan Keterjangkauan Pengguna Jasa angkutan kota di Kota Bandung; dan Masukan-masukan kepada pihak pemerintah dan pihak terkait lainnya. Nilai ATP untuk trayek Margahayu Raya – Ledeng adalah rata-rata Rp. 5.823,- dan ATP trayek Sadang Serang – Caringin adalah rata-rata Rp. 9.611,-. Nilai WTP untuk trayek Margahayu Raya – Ledeng rata-rata jarak dekat Rp. 1.670,-; jarak sedang Rp. 2.588,- dan jarak jauh Rp. 4.473,-. Sedangkan WTP untuk trayek Sadang Serang-Caringin rata-rata jarak dekat Rp. 2.046,-; jarak sedang Rp. 3.325,- dan jarak jauh Rp. 5.172,-.

Kata kunci: Tarif Ideal, ATP, WTP, Keterjangkauan

1. Pendahuluan

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia menggunakan fasilitas jalan raya untuk angkutan umum sebagai salah satu usaha untuk mengatasi pergerakan penduduk. Adanya fasilitas tersebut bertujuan agar pergerakan penduduk dari asal ke tujuan atau sebaliknya dapat dilakukan dengan leluasa. Saat ini angkutan umum khususnya angkot (angkutan kota) di Kota Bandung memiliki jaringan pelayanan yang cukup luas hampir mencakup ke seluruh pelosok kota dengan sejumlah rute yang dilayani.

Pihak pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan tentang wewenang yang dipercayakan kepada pihak swasta untuk mengelola angkot. Berdasarkan kebijakan yang diberikan banyak pengusaha jasa transportasi melakukan investasi berupa pengoperasian angkutan umum. Namun dengan adanya kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) maka hal ini akan mempengaruhi biaya operasional jasa angkutan umum, sehingga pihak operator (pengusaha) menaikkan tarif angkutan umumnya. Di lain pihak bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum akan semakin terbebani pula.

Penetapan besaran tarif angkutan kota seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara pengusaha angkutan kota dengan masyarakat pengguna. Agar pihak operator tetap bisa melayani kebutuhan masyarakat pengguna angkot dan bisa saling menguntungkan, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap tarif yang ditetapkan.